

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 155 - 165	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

## PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT

**Binahayati Rusyidi, Muhammad Fedryansah**

<sup>1</sup>Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

binahayati@unpad.ac.id

<sup>2</sup>Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

m.fedryansyah@unpad.ac.id

### ABSTRAK

Pengembangan pariwisata saat ini mulai menjadi salah satu program unggulan dalam pembangunan daerah. Pembangunan pariwisata tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan lapangan kerja di daerah. Salah satu kabupaten yang memiliki potensi wisata adalah Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka memiliki sumber daya alam yang potensial dan menarik untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata seperti kawasan pantai, sumber air panas, peninggalan sejarah, serta kawasan gunung dan perbukitan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Bangka terutama di kawasan Pantai Rambak dan Pantai Rebo. Adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melibatkan 20 orang informan, dengan teknik wawancara mendalam dan focus group discussion. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya model pengembangan pariwisata yang diusulkan dengan menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat. Pengembangan pariwisata di kawasan Pantai Rambak dan Pantai Rebo pada dasarnya merupakan potret upaya pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bangka secara keseluruhan. Kajian ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah model alternatif yang dapat diterapkan dalam pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Bangka. Adapun model pengembangan pariwisata tersebut dapat dilihat dalam beberapa tahapan, antara lain: tahap awal (*beginning*), tahap pertengahan (*middle*), dan tahap lanjutan (*advanced*). Dari ketiga tahapan tersebut, terdapat pergeseran strategi, dari strategi direktif menuju ke strategi non-direktif. Pendekatan direktif merupakan pembentukan budaya pariwisata di masyarakat. Sedangkan pendekatan non-direktif merujuk pada budaya pariwisata yang telah tertanam dalam aktivitas kehidupan masyarakat, serta kesadaran dari masyarakat untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam di sekitarnya. Kedua pendekatan tersebut (direktif dan non-direktif) menekankan pada pelibatan penuh kepada masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata.

Keywords: pariwisata, pariwisata berbasis masyarakat, pendekatan partisipatif

### PENDAHULUAN

Industri pariwisata saat ini menjadi salah satu industri yang mempunyai peran cukup penting dalam pembangunan nasional berbagai

negara. Di tahun 2017, secara global industri pariwisata telah mengubah kehidupan jutaan orang melalui mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 155 - 165	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

kemiskinan, dan mempercepat pembangunan serta penguatan toleransi (Crotti & Misrahi, 2017). Kondisi yang sama juga terjadi di Indonesia di mana sektor pariwisata pada tahun 2016 menunjukkan perkembangan dan kontribusi yang terus meningkat dan semakin signifikan terhadap *Product Domestic Brutto* (PDB) nasional sebesar 4,03% atau senilai Rp. 500,19 triliun, dengan peningkatan devisa yang dihasilkan mencapai Rp. 176-184 triliun dan tenaga kerja pariwisata sebanyak 12 juta orang (Kementrian Pariwisata, 2016).

Melihat pada potensi tersebut, pengembangan pariwisata mulai menjadi salah satu program unggulan dalam pembangunan daerah. Pembangunan pariwisata yang direncanakan dan dikelola secara berkelanjutan dengan berbasis pada masyarakat akan mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menciptakan lapangan kerja. Di samping itu, pembangunan pariwisata juga dapat menciptakan pendapatan yang dapat digunakan untuk melindungi dan melestarikan budaya dan lingkungan dan secara langsung menyentuh masyarakat setempat.

Salah satu daerah yang sedang giat dalam mengembangkan pariwisata adalah Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka memiliki sumber daya alam yang potensial dan menarik untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata seperti kawasan pantai, sumber air panas, peninggalan sejarah, serta kawasan gunung dan perbukitan. Lebih lanjut, Kabupaten Bangka telah memiliki fasilitas yang mendukung sektor pariwisata seperti 21 hotel, dengan 6 hotel diantaranya merupakan hotel berbintang. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke

Kabupaten Bangka juga menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Di tahun 2014 terdapat 9 orang wisatawan mancanegara, kemudian berturut-turut di tahun 2015 dan 2016 jumlah tersebut menjadi 48 orang dan 71 orang wisatawan mancanegara. Di sisi lain, jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata mengalami penurunan. Di tahun 2013 jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata mencapai 501 orang, dan di tahun 2014 dan 2015 menurun menjadi 396 orang dan 393 orang. Selain itu, pendapatan di sektor pariwisata di tahun 2016 yang tercatat hanya sebesar Rp. 240 juta (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, 2017). Hal ini menjadi dasar diperlukannya suatu rencana pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di Kabupaten Bangka. Dengan kata lain, pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Terkait dengan pengembangan pariwisata, Page (2009)<sup>4</sup> menyebutkan setidaknya terdapat 5 (lima) pendekatan dalam pengembangan pariwisata yaitu:

- 1) *Boostern approach*. Pendekatan ini merupakan pendekatan sederhana yang menjelaskan bahwa pariwisata sebagai suatu akibat yang positif bagi suatu tempat berikut penghuninya. Namun demikian, pendekatan ini tidak melihat adanya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan daya dukung wilayah tidak dipertimbangkan secara matang.
- 2) *The economic industry approach*. Pendekatan pengembangan pariwisata lebih menekankan pada tujuan ekonomi daripada tujuan sosial dan lingkungan, serta

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 155 - 165	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

menjadikan pengalaman dari pengunjung dan tingkat kepuasan pengunjung sebagai sasaran utama.

- 3) *The physical spatial approach*. Pendekatan pengembangan pariwisata ini mengacu pada penggunaan lahan geografis dengan strategi pengembangan berdasarkan prinsip keruangan (spasial). Misalnya pembagian kelompok pengunjung untuk menghindari konflik antar pengunjung.
- 4) *The community approach*. Pendekatan pengembangan pariwisata yang menekankan pada pelibatan masyarakat secara maksimal dalam proses pengembangan pariwisata.
- 5) *Sustainable approach*. Pengembangan pariwisata dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan atau kepentingan masa depan atas sumber daya serta dampak pembangunan ekonomi terhadap lingkungan.

Penelitian ini bertujuan merumuskan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Bangka. Hal ini mengacu pada masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka. Dengan pendekatan berbasis masyarakat ini diharapkan munculnya *sense of belonging* masyarakat dalam sektor pariwisata di Kabupaten Bangka yang pada akhirnya memacu partisipasi masyarakat dalam pengembangan sector pariwisata.

## TINJAUAN PUSTAKA

Pariwisata merupakan suatu aktivitas yang kompleks yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang terdiri dari beragam

komponen seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya. Ketika pariwisata dipandang sebagai sebuah sistem, maka analisis tentang kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari subsistem yang lain, seperti politik, sosial ekonomi, budaya dan seterusnya. Subsistem tersebut memiliki hubungan saling ketergantungan dan saling terkait (*interconnectedness*). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada salah satu subsistem akan menyebabkan juga terjadinya perubahan pada subsistem yang lainnya, sampai akhirnya kembali ditemukan harmoni yang baru. Pariwisata adalah sistem dari berbagai elemen yang tersusun seperti sarang laba-laba : "*like a spider's web- touch one part of it and reverberations will be felt throughout*" (Mill & Marrison, 1985:19 dalam Phillips and Pittman, 2009).

Pemahaman mengenai pariwisata sebagai suatu sistem tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak aktor yang terlibat serta memiliki peran dalam menggerakkan sistem pariwisata. Aktor-aktor tersebut, baik individu maupun kelompok, disebut pula sebagai insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor yang terkait dengan pariwisata. Secara umum, insan-insan pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu: (1) masyarakat, (2) swasta, dan (3) pemerintah. Pilar masyarakat merujuk pada masyarakat umum yang ada pada destinasi atau lokasi wisata, sebagai pemilik sah dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata seperti kebudayaan. Termasuk didalamnya tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan media massa. Pilar selanjutnya adalah pilar swasta yaitu asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha yang terkait secara langsung

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 155 - 165	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

maupun tidak langsung dengan pariwisata. Pilar terakhir adalah pemerintah yang memiliki wewenang pada berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, negara bagian, provinsi, kabupaten, dan seterusnya (Pitana & Gayatri, 2005).

Mengacu pada pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan pariwisata sepantasnya melibatkan ketiga pilar tersebut. Pengembangan pariwisata tidak hanya mengandalkan kemampuan bisnis dari pihak swasta. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah maupun masyarakat, maka pengembangan bisnis pariwisata yang dijalankan oleh pihak swasta tidak dapat berjalan lancar. Begitupula pengembangan pariwisata yang hanya dikelola oleh pemerintah, tanpa melibatkan pilar lainnya. Pemerintah akan mengalami kesulitan dalam peningkatan investasi dan modal dalam pengembangan pariwisata tersebut. Namun, hal yang paling penting adalah keterlibatan dari pilar masyarakat yang selama ini sering kali diabaikan dalam pengembangan pariwisata. Akibatnya masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah atau destinasi wisata sering kali tidak ikut merasakan manfaat dari pengembangan pariwisata di sekitar mereka. Jikapun terlibat maka peran yang mereka jalankan sangat minimal sehingga tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat local. Pada beberapa kasus, masyarakat local di sekitar destinasi wisata hanya menjadi penonton sementara pada saat yang sama mereka terkena berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang negative akibat dari pengembangan wisata di daerah mereka (Anuar & Sood, 2017).

Kondisi tersebut memunculkan pandangan tentang pentingnya pengembangan pariwisata

berbasis masyarakat. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa terdapat lima pendekatan dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah *the community approach* atau pendekatan kemasyarakatan atau komunitas. Untuk memahami pendekatan komunitas ini akan digunakan pemahaman mengenai pengembangan masyarakat atau *community development*.

Diskusi tentang pengembangan masyarakat telah menjadi isu yang berkembang dalam kajian-kajian pembangunan. Beragam pendapat telah dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskan tentang pengembangan masyarakat ini, mulai dari definisi, sejarah, prinsip, hingga strategi dalam pengembangan masyarakat. Dari sekian banyak pandangan tersebut, untuk menjelaskan keterkaitan antara pengembangan masyarakat dengan pengembangan pariwisata dapat dilihat dari pandangan Dunham tentang fokus pada pengembangan masyarakat. Dunham (dalam Adi, 2007)<sup>7</sup> menyebutkan bahwa *community development* lebih memfokuskan diri pada pengembangan kehidupan ekonomi, prasarana fisik, pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan dalam arti sempit. Dengan demikian, berdasarkan pandangan Dunham tersebut, maka sektor pariwisata termasuk dalam fokus kajian pengembangan masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa sektor pariwisata dipandang sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat subsistem-subsistem lain, yang salah satunya adalah bidang ekonomi.

Pemahaman lain mengenai pengembangan masyarakat, dapat dilihat dari pendapat Sanders (1970)<sup>8</sup> yang menyebutkan terdapat empat cara pandang terhadap pengembangan masyarakat. Empat cara tersebut

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 155 - 165	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

antara lain pengembangan masyarakat sebagai sebuah proses, metode, program, dan gerakan. Pengembangan masyarakat sebagai sebuah proses, menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat dilihat sebagai suatu proses yang bergerak dari satu tahap ke tahap yang lain, atau dari satu kondisi kepada kondisi selanjutnya; yang berarti pergerakan yang progresif dengan kriteria yang spesifik. Kemudian sebagai sebuah metode, pengembangan masyarakat dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pengembangan masyarakat dipandang sebagai sebuah program ketika pengembangan masyarakat tersebut memiliki seperangkat prosedur dan sederet aktifitas. Selanjutnya pengembangan masyarakat dipandang sebagai sebuah gerakan ketika pengembangan masyarakat diarahkan sebagai penjabaran dari nilai-nilai dan tujuan.

Selain dari pandangan Sanders, dapat dilihat pula pendapat lain yang menjelaskan tentang pendekatan dalam pengembangan masyarakat. Batten (dalam Adi, 2012) menyebutkan setidaknya terdapat dua pendekatan dalam pengembangan masyarakat, yaitu pendekatan yang direktif (instruktif), dan pendekatan yang non-direktif (partisipatif). Pada pendekatan direktif, biasanya efektif untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek dan bersifat pada pencapaian penyelesaian masalah yang substantif. Pendekatan direktif ini dirasakan kurang efektif ketika sasarannya adalah perubahan yang mendasar seperti pengetahuan, keyakinan, sikap, dan niat individu. Di sisi lain, pendekatan non-direktif lebih menekankan pada penempatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam upaya perubahan yang terjadi dalam diri mereka. Pada pendekatan ini masyarakat menjadi penentu dan

pembuat analisis, sehingga mereka memiliki kesempatan yang luas untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan cara-cara yang paling sesuai dengan mereka.

## METODE

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai pengalaman individu-individu dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Rubin and Babbie (2008) : "*qualitative research methods attempt to tap deeper meanings of particular human experiences and are intended to generate qualitative data: theoretically richer observations that are not easily reduced to numbers*".

Pengumpulan data dalam kegiatan ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dengan kebijakan dan program pengembangan pariwisata yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka. Sedangkan data primer diarahkan untuk menggali informasi secara langsung di lapangan terkait dengan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, yang dilakukan dengan cara menggunakan wawancara mendalam serta melakukan *Focused Group Discussion*. Informan penelitian berjumlah 20 orang yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai pengembangan pariwisata di kawasan Pantai Rambak dan Pantai Rebo, kecamatan Sungailiat. Informan tersebut terdiri dari aparat pemerintahan Kabupaten Bangka, aparat Kecamatan Sungai Liat, aparat pemerintahan desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat local yang ada di kawasan Pantai Rambak dan Pantai Rebo. Lokasi penelitian

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 155 - 165	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

difokuskan pada kawasan Pantai Rambak dan kawasan Pantai Rebo mengingat pengembangan kedua pantai tersebut masih sangat minimal meskipun sangat berpotensi menjadi tujuan wisata nasional dan mancanegara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan pariwisata di kawasan Pantai Rambak dan Pantai Rebo pada dasarnya merupakan potret upaya pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bangka secara keseluruhan. Kajian ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah model alternatif yang dapat diterapkan dalam pengembangan pariwisata di wilayah Kabupaten Bangka. Salah satu unsur penting dalam pengembangan pariwisata adalah pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat tidak hanya jadi penonton, namun dapat turut menjadi aktor dalam pengembangan pariwisata di wilayahnya.

Dari hasil temuan lapangan diketahui gambaran mengenai pertumbuhan industri pariwisata di Kabupaten Bangka. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, industri pariwisata menjadi salah satu ujung tombak dalam kegiatan ekonomi masyarakat seiring dengan menurunnya mata pencaharian masyarakat pada sektor pertambangan timah. Pembatasan area dan aktivitas tambang timah rakyat yang diterapkan oleh pemerintah telah mempersempit kesempatan kerja di bidang tersebut sehingga masyarakat berusaha mencari sector alternative.

Bidang kerja sector pariwisata yang dimasuki oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada bidang pekerjaan langsung seperti pekerja hotel, akan tetapi juga pada bidang pekerjaan lain

yang juga terkait dengan pariwisata itu sendiri. Misalnya usaha pengembangan makanan olahan hasil laut, kerajinan tangan, dan lainnya. Industri kuliner sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan industri pariwisata juga semakin berkembang dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat di dalamnya. Kabupaten Bangka saat ini telah dikenal sebagai salah satu pusat kuliner olahan laut, dimulai dari beragam makanan laut segar (*seafood*) sampai dengan hasil olahan seperti krupuk, kemplang, empek-empek, otak-otak, tekwan, mie koba, dan lainnya. Selain industri kuliner, sektor transportasi juga mengalami perkembangan, seiring dengan masuknya Kabupaten Bangka sebagai salah satu destinasi wisata nasional. Penerbangan dari Jakarta ke Pangkal Pinang juga mengalami peningkatan di mana hampir semua maskapai besar nasional membuka jalur penerbangan ini dengan frekuensi penerbangan dari Jakarta minimal 7 kali sehari, belum termasuk penerbangan dari dan ke Palembang, Tanjung Pandan, dan sebagainya. Tentunya hal ini akan menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong semakin banyaknya wisatawan yang datang ke Kabupaten Bangka.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka tersebut juga tidak lepas dari pembangunan infrastruktur yang terus berjalan di Kabupaten Bangka. Penyelesaian jalur lintas (*bypass*) dari Kota Pangkal Pinang menuju Sungai Liat misalnya, selain dapat mengurangi jarak tempuh juga dapat membuka akses-akses pemukiman baru. Pembangunan infrastruktur ini juga mendorong sektor properti untuk mengembangkan pemukiman-pemukiman baru di Kabupaten Bangka. Selain pembangunan jalan,

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 155 - 165	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

ketersediaan fasilitas umum seperti Rumah Sakit Daerah yang dibangun pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka.

Lebih lanjut, untuk memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Bangka juga tidak dapat dilepaskan dari industri pertambangan timah. Pertambangan timah sudah menjadi bagian dari aktifitas masyarakat Kabupaten Bangka sejak jaman kolonial. Bahkan, sisa-sisa kejayaan pertambangan timah pada jaman kolonial tersebut masih dapat dilihat baik dari bangunan (perumahan bergaya kolonial, pergudangan, maupun *smelter*), maupun dari koleksi Museum Timah. Kabupaten Bangka seolah-olah sudah ditakdirkan sebagai penghasil timah terbesar di Indonesia, di mana pasir timah dapat dengan mudah ditemukan baik di darat maupun di laut. Pengelolaan tambang timah, di jaman kolonial dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang milik Belanda. Kemudian, sejak jaman kemerdekaan, pengelolaan timah di Kabupaten Bangka dipegang oleh PN Timah (selanjutnya dikenal sebagai PT Timah) sebagai perusahaan milik negara yang mendapatkan mandat untuk melakukan pertambangan timah. Namun, semenjak era reformasi, penambangan timah tidak lagi didominasi oleh perusahaan resmi. Banyak penambangan-penambangan yang dikelola langsung oleh masyarakat. kondisi ini mendorong banyaknya tenaga kerja di pertambangan timah yang berasal dari luar Kabupaten Bangka.

Pertambangan timah di Kabupaten Bangka juga mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pasca reformasi telah terjadi pergeseran mata

pencarian penduduk. Masyarakat Kabupaten Bangka, pada umumnya merupakan masyarakat petani perkebunan lada atau tanaman keras lainnya dan nelayan. Hanya sebagian kecil masyarakat yang bekerja sebagai pegawai di perusahaan timah. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, terjadi perubahan pola mata pencarian. Masyarakat yang tadinya berprofesi sebagai petani dan nelayan banyak yang meninggalkan profesi tersebut, mereka beralih profesi menjadi penambang liar. Aktivitas penambangan timah dirasakan masyarakat lebih menjanjikan dibandingkan dengan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Jika dilihat dari segi pendapatan, penambangan timah memang jauh lebih baik dibandingkan dengan nelayan atau petani. Namun, jika dilihat dari keberlanjutan, penambangan timah cenderung lebih rentan dibandingkan dengan nelayan dan petani. Masyarakat saat ini juga sudah mulai menyadari akan hal tersebut, sehingga kurang lebih sejak tahun 2010 banyak masyarakat asli Kabupaten Bangka yang kemudian kembali menjadi petani dan nelayan.

Melihat pada fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat Kabupaten Bangka merupakan masyarakat yang mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Hal ini menjadi faktor penguat bagi pemerintah daerah apabila ingin mengembangkan industri pariwisata di Kabupaten Bangka. Kebijakan ini dirasakan akan didukung oleh masyarakat, karena masyarakat akan mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kesiapan masyarakat juga dapat menjadi faktor yang memperkuat kebijakan pemerintah daerah tersebut. Masyarakat sudah siap apabila sektor pariwisata dikembangkan di daerah mereka.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 155 - 165	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

Dalam artian profesi atau mata pencaharian masyarakat; yang sebelumnya didominasi oleh petani, nelayan, dan penambang timah; akan menyesuaikan dengan arah kebijakan pengembangan pembangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut.

Sektor pariwisata juga dipandang masyarakat sebagai salah satu potensi yang dimiliki Kabupaten Bangka. Oleh karena itu, masyarakat mendukung dengan kebijakan pemerintah yang akan mengelola objek-objek wisata yang ada di wilayahnya. Masyarakat berpikir bahwa selama ini mereka memiliki potensi sumberdaya alam maupun keterampilan yang dapat mendukung dalam upaya peningkatan sektor pariwisata di Kabupaten Bangka. Secara khusus, masyarakat di wilayah Pantai Rambak dan Pantai Rebo juga menyatakan siap untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola objek wisata di wilayah mereka. Mereka menekankan kepada pengelolaan potensi sumber daya alam Kabupaten Bangka, yang memperhatikan kepentingan masyarakat serta tetap mengedepankan nilai dan budaya masyarakat.

Masyarakat sangat menyadari kawasan pantai yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka sangat indah dan memiliki potensi untuk dikembangkan serta membawa dampak yang positif bagi perekonomian masyarakat. Masyarakat akan sangat antusias dengan bentuk pengelolaan pantai yang lebih baik. Arti "baik" dalam kacamata masyarakat adalah memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat setempat.

Belajar dari pengelolaan wisata pantai yang selama ini telah berdiri di Kabupaten Bangka,

masyarakat menyebutkan adanya prasyarat yang harus diperhatikan untuk mengelola pantai Rambak dan Rebo. Prasyarat penting antara lain menyangkut keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan tersebut. Selama ini masyarakat belum terlibat dalam pengelolaan pariwisata secara terintegrasi dengan konsep kepariwisataan di Kabupaten Bangka. Selama ini pengelolaan wisata pantai yang dikelola secara eksklusif oleh beberapa investor, dinilai belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Masyarakat mengharapkan potensi-potensi dalam pengelolaan bahan makanan laut, keterampilan yang mereka miliki, maupun keseharian mereka sebagai masyarakat dapat menjadi bagian dalam wisata itu sendiri.

Selain itu masyarakat memandang bahwa budaya berorientasi melayani (*service oriented*) yang diperlukan dalam pengembangan sector jasa pariwisata masih cukup asing di kalangan masyarakat. Padahal pengembangan wisata, selain didukung oleh keberadaan sumber tujuan wisata yang indah dan menarik juga harus didukung dengan keberadaan sumber daya dan masyarakat yang ramah, peduli, melayani, dan sebagainya. Perubahan orientasi ini harus menjadi prasyarat jika pengembangan wisata akan dijadikan sebagai sector strategis yang melibatkan masyarakat. Hal ini juga diakui oleh pemerintah daerah yang menegaskan urgensi rekayasa sosial di dalam membangun tatanan dan kapasitas masyarakat berserta pelaku usaha wisata lainnya.

Melihat pada hasil temuan lapangan mengenai kondisi sosial budaya masyarakat, kondisi lingkungan serta sumber daya alam yang ada, dapat dilakukan analisis mengenai potensi dan ancaman terkait dengan industri pariwisata di

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 155 - 165	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

Kabupaten Bangka. Selanjutnya hasil analisis akan menjadi fondasi dalam pembentukan suatu model pengembangan pariwisata yang memberikan manfaat secara optimal bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, antara lain pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Model pengembangan pariwisata dengan menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat merupakan salah satu alternatif yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Bangka berdasarkan hasil kajian lapangan yang telah dilakukan. Di dalam model ini juga akan melibatkan aktor-aktor yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masing-masing aktor tersebut diharapkan melakukan suatu tindakan bersama sesuai dengan peranannya masing-masing. Pada model ini juga memberikan penekanan pada pemberian peran kepada masyarakat yang semakin besar pada akhirnya.

Model pengembangan pariwisata dengan pendekatan pengembangan masyarakat tersebut dapat dilihat dalam beberapa tahapan, antara lain: tahap awal (*beginning*), tahap pertengahan (*middle*), dan tahap lanjutan (*advanced*). Tahapan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dalam proses pengembangan pariwisata. Pada tahap awal (*beginning*), peran pemerintah menjadi sangat sentral. Mengingat pemerintah memiliki visi dan misi dalam pembangunan daerah, sehingga komitmen pemerintah dalam pengembangan pariwisata sudah tercantum dalam misi pembangunan daerah. Selain itu, pada tahap awal ini, peran dan partisipasi masyarakat masih belum terlihat. Pendekatan pengembangan masyarakat masih menggunakan strategi direktif (instruktif). Pendekatan direktif ini akan diarahkan untuk pembentukan budaya pariwisata di masyarakat.

Masyarakat masih harus diarahkan untuk bertindak dan berperilaku yang mendukung pariwisata. Hal ini akan menjadi lebih mudah ketika memahami karakter masyarakat yang cenderung adaptif terhadap perubahan.

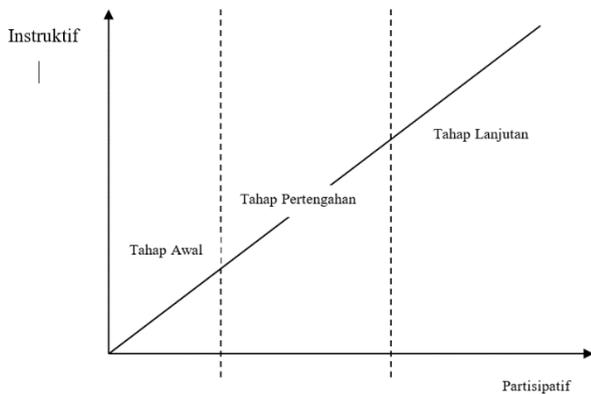
Pemerintah dan swasta harus bekerjasama dalam pengembangan pariwisata. Kerjasama ini akan menumbuhkan jaminan keberlanjutan (*sustainability*) program dan secara tidak langsung juga akan menciptakan kepercayaan di mata masyarakat. Sebab pada tahap ini masyarakat sudah mulai merasakan manfaat dari industri pariwisata yang ada di tempat tinggal mereka. Kondisi ini akan menumbuhkan kesadaran untuk terus mempertahankan ataupun memperkuat posisi mereka melalui serangkaian aktivitas dalam dunia pariwisata. Ketika masyarakat merasakan manfaat dari keberadaan industri pariwisata tersebut, maka akan muncul *sense of belonging* atau rasa memiliki terhadap industri pariwisata sebagai bagian dari diri dan hidupnya.

Selanjutnya, pada tahap lanjutan (*advanced*) sudah mulai terlihat adanya keseimbangan peran antara aktor-aktor yang terlibat dalam industri pariwisata. Hubungan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat semakin erat dan seimbang antara satu dan lainnya. Pada kondisi ini, industri pariwisata diharapkan tidak saja menguntungkan bagi pihak swasta, ataupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata. Akan tetapi, di tahap ini sektor pariwisata juga sudah memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Budaya pariwisata juga telah tertanam dalam aktifitas kehidupan masyarakat, serta kesadaran dari masyarakat untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam di sekitarnya. Pada tahap ini, pendekatan

pengembangan masyarakat telah bergeser, dari direktif (instruktif) menjadi non-direktif (partisipatif).

Secara sederhana pergeseran dari masing-masing tahapan tersebut dapat dilihat pada skema di bawah ini.

Gambar 1. Model Pengembangan Pariwisata dengan Pendekatan Pengembangan Masyarakat



Sumber : Diolah dari Hasil Penelitian, 2015

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian mengenai pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Bangka ini antara lain :

1. Pengembangan pariwisata dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan masyarakat (*the community approach*). Pendekatan ini menekankan pada pelibatan penuh kepada masyarakat dalam proses pengembangan pariwisata.
2. Pendekatan pengembangan masyarakat (*community development*) dapat digunakan untuk membangun model pengembangan pariwisata di kawasan Pantai Rambak dan Pantai Rebo Kabupaten Bangka.

3. Model pengembangan pariwisata dengan pendekatan pengembangan masyarakat dapat dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu tahap awal, tahap pertengahan, dan tahap lanjutan. Di tahap awal, strategi yang dilakukan adalah strategi direktif (instruktif). Strategi ini kemudian bergeser menjadi setengah direktif dan setengah non-direktif di tahap pertengahan. Kemudian di tahap lanjutan, strategi yang dilakukan adalah strategi non-direktif (partisipatif).

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. (2012). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Adi, I.R. (2017). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta : FISIP UI Press.
- Anuar, A.N.A. & Sood, N.A.A. (2017). Community based tourism: Understanding, benefits and challenges. *Journal of Tourism and Hospitality*, 6(1). DOI: 10.4172/2167-0269.1000263.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka. 2017. *Kabupaten Bangka Dalam Angka 2017*.
- Crotti, R. & Mirashi, T. (Eds.). (2017). *The Travel and Tourism Competitiveness Report*. Geneva : World Economic Forum.

Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial	ISSN: 2620-3367	Vol. 1 No: 3	Hal: 155 - 165	Desember 2018
-----------------------------------	-----------------	--------------	----------------	---------------

Fennel, D.A (1999). *Ecotourism : An Introduction*.  
United Kingdom : Routledge.

Kementrian Pariwisata. (2017). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2016*. Jakarta: Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kementerian.

Page, S. (2009). *Tourism Management : Managing for Change*. Burlington, MA: Elsevier Ltd.

Phillips, R. & Pittman, R. (2009). *An Introduction to Community Development*. Routledge.

Pitana, I.G. & Gayatri, P.G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.

Rubin, A. & Babbie, E. (2008). *Research Methods for Social Work*. Belmont,CA : Brooks/Cole.

Sanders, I.T. (1970). The Concept of Community Development. Dalam *Community Development as a Process*. Leo J. Cary. (Ed.).

Columbia, MO: University of Missouri Press.